

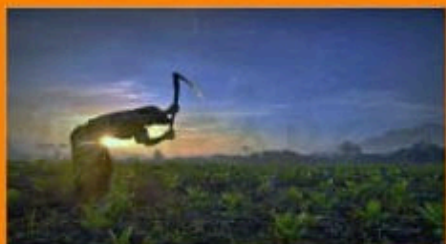


DPMDPPKB

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoralpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 7 Maret 2024

Inspaktur,



R. H. H. S. H., M. Hum.
Peny. Utama Muda (IV/c)
06411121992031008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas karunianya dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang telah berhasil disusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, yang berfungsi sebagai bahan penilaian kinerja, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta sebagai pengendali peningkatan kinerja berdasarkan sasaran strategis, urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian disampaikan semoga dokumen penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 12 Februari 2024


Plt. KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESIR SELATAN
SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusunnya dengan baik Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238); dan yang diturunkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026; dan review terhadap target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam upaya mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan melaksanakan 7 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 3 Sasaran dan 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A 82,00%	A 80,17%	97,77%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.801.684.973	Rp. 4.621.848.359	96,25%
						Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 2.498.200	Rp. 2.486.000	99,51%
		Persentase Nagari Mandiri	12,64% (23 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	139,10%	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.269.718.332	Rp. 2.257.145.357	99,45%
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 714.466.816	Rp. 707.762.924	99,06%
2.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15%	1,35%	82,61%	Pengendalian Penduduk	Rp. 263.400.000	Rp. 225.330.499	85,55%
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.483.316.024	Rp. 3.119.893.230	89,57%
						Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.388.600.000	Rp. 2.126.290.000	89,02%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%				
Total					79,87%		Rp. 13.923.684.345	Rp. 13.060.756.369	93,80%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tergambarkan dalam suatu bentuk untuk mencapai masa depan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dan mengacu pada Visi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan, yaitu :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, di dukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

Selanjutnya Misi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan yang ingin diwujudkan mengacu kepada Misi Nomor 1, 2, 4, 5, 6, yaitu :

- Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan;
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;
- Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenang dan Dinamis;

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 dengan capaian program adalah 93,80% secara keseluruhan.

Pada pengukuran rata-rata capaian program kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dari 3 sasaran dengan rata-rata 93,80%, berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
1.5. Sumber Daya Manusia Kepegawaian	18
1.6. Isu-Isu Strategis	18
1.7. Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Kinerja	23
2.2. Perjanjian Kinerja	24
2.3. Indikator Kinerja Utama	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metodologi Penilaian Kinerja	26
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	27
3.3. Capaian Kinerja	28
3.4. Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Saran	47
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	
3. Penghargaan Yang Diterima Perangkat Daerah Tahun 2021-2023	
4. Data Dukung Lainnya	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang termasuk pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dokumen Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, yang berfungsi sebagai bahan penilaian kinerja, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja berdasarkan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kewenangan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Dalam rangka pembangunan Pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kebaikan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan anggaran tersedia serta terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dengan demikian, perencanaan anggaran yang disusun merupakan penganggaran pada program dan kegiatan yang berbasis kinerja, yaitu : anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukannya realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, maka dengan capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilaksanakan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja adalah sebagai gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari faktor keberhasilan dan kegagalan terhadap capaian kinerja Tahun 2023, serta untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, baik bagi keperluan eksternal atau pihak terkait, yang menjadikan laporan kinerja Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2023;
2. Capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan, serta tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2023;
3. Aspek Manajemen Kinerja, baik bagi keperluan internal yang menjadikan laporan kinerja Tahun 2023 sebagai pedoman dan petunjuk untuk dokumen lainnya.

1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan membawahi ;

1. Sekretariat;
2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya;
3. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Bidang Pemerintahan Nagari;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. UPTD.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud lebih lanjut diuraikan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;

- g. Pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan susunan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- l. Mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
- d. Pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
- b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- c. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
- d. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

- e. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sekretariat dengan mempedomani tata naskah dinas;
- f. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi petunjuk, memberi tugas dan kegiatan, mengevaluasi, membina, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Menyampaikan saran dan telahaan kepada pimpinan menyangkut bidang Sekretariat;
- i. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bidang umum dan kepegawaian, sub bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, aset, urusan rumahtangga, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- m. Menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
- c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :

- a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
- d. Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
- e. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
- f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
- g. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
- h. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- j. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;

- k. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan: dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai uraian tugas :

- a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- e. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- g. Menyusun kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- h. Memantau kegiatan perencanaan dan program di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- i. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pemerintahan Nagari

Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pemerintahan Nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan operasional di Bidang Pemerintahan Nagari;
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan Bidang Pemerintahan Nagari;
- c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemerintahan Nagari;
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemerintahan Nagari; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai uraian tugas :

- a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pemerintahan Nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan Pemerintahan Nagari, Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari serta Keuangan, Pendapatan dan Aset Nagari;
- d. Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di Bidang Pemerintahan Nagari;
- e. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemerintahan Nagari, Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari serta Keuangan dan Aset Nagari;
- f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis Bidang Pemerintahan Nagari;
- g. Menyusun saran kebijakan pedoman, norma, standar dan prosedur di Bidang Pemerintahan Nagari;
- h. Memantau kegiatan perencanaan dan program di Bidang Pemerintahan Nagari;
- i. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- l. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
- d. Pembinaan, evaluasi dan pengawasan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Menyusun bahan rumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian melaksanakan/menyelenggarakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi di Bidang Keluarga Berencana;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;

- g. Mengkoordinir pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Mengkoordinir penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Mengawasi tugas administrasi umum di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Mengawasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, serta pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. Melakukan pembinaan dan fasilitasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kecamatan;
- o. Memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- Penggerak Swadaya Masyarakat;
- Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana kerja (program, kegiatan dan sub kegiatan) dan pelaporan di lingkungan dinas, memberi dukungan dan melakukan pembinaan, sesuai dengan nomenklatur dan ketentuan perundang-undangan.

7. UPTD

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

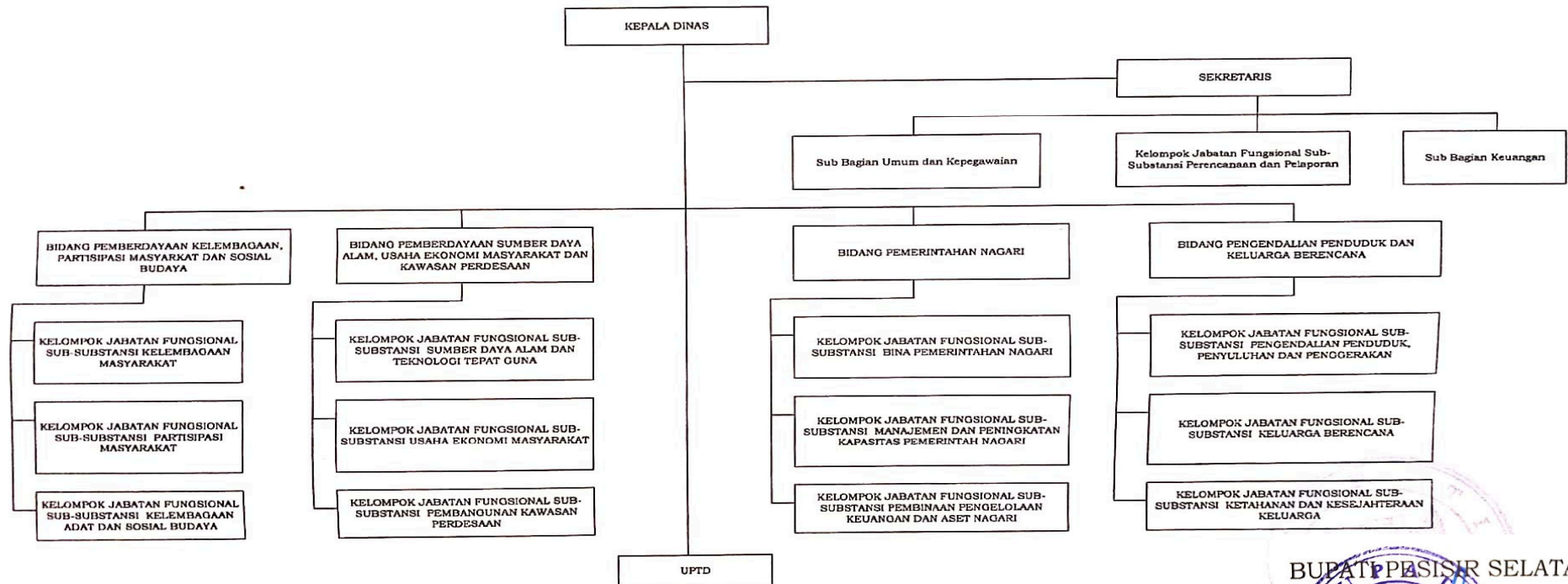
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Partisipasi Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya;
4. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Bidang Pemerintahan Nagari, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Pemerintahan Nagari;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;

6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keluarga Berencana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. UPTD, terdiri dari :
 - Balai Penyuluh Keluarga Berencana di 15 Kecamatan;

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 168 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESIR SELATAN



BUPATI PESIR SELATAN,
RUSMA YULIANWAR

Sumber Data : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.5. Sumber Daya Manusia Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan Total Keseluruhan sebanyak 53 Orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Honorer. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Golongan	Eselon				Staf	Total
	II.b	III.a	III.b	IV.a		
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/b	1	1	-	-	-	2
Golongan IV/a	-	-	1	3	1	5
Golongan III/d	-	-	3	5	2	10
Golongan III/c	-	-	-	1	8	9
Golongan III/b	-	-	-	-	4	4
Golongan III/a	-	-	-	-	3	3
Golongan II/d	-	-	-	-	2	2
Golongan II/c	-	-	-	-	-	0
Golongan II/b	-	-	-	-	-	0
Golongan II/a	-	-	-	-	-	0
Jumlah PNS	1	1	4	9	20	35
Tenaga Honorer S-II	-	-	-	-	-	0
Tenaga Honorer S-I/D-IV	-	-	-	-	11	11
Tenaga Honorer D-III	-	-	-	-	1	1
Tenaga Honorer SMA	-	-	-	-	6	6
Jumlah Tenaga Honorer	0	0	0	0	18	18
Total	1	1	4	9	38	53

Sumber Data : Absen DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

1.6. Isu-Isu Strategis

Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Permasalahan :

1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya :

1. Belum optimalnya sinergitas terhadap kerja sama antar OPD dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Belum optimalnya sinergitas terhadap kerja sama antar kelembagaan masyarakat yang ada di Nagari;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan Nagari;
4. Rendahnya peran kader dan anggota kelembagaan masyarakat lainnya dalam pembangunan Nagari;
5. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan RKP Nagari disinkronisasikan dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan;
6. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan Status Nagari mulai dari Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri;
7. Masih adanya perbedaan pemahaman tentang Kepengurusan KAN dan Historis Adat dimasing-masing KAN di Kab. Pesisir Selatan;
8. Belum banyaknya peran dari LPMN dalam Forum Musrenbang Nagari;
9. Masih kurangnya SDM sebagai Pengurus PKK dan kurangnya peranan PKK dalam Masyarakat.

2. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan :

1. Kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan;
2. Tidak memadainya anggaran kegiatan KKN yang dilaksanakan di Kab. Pesisir Selatan yang lokasinya berada di berbagai Kecamatan untuk mendukung kegiatan KKN ini;
3. Adanya 2 UPK yang bermasalah dengan hukum;

4. Tidak adanya laporan pertanggung jawaban BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK dari pengurus serta banyaknya masa periode kepengurusan habis dan tidak aktif;
5. Tidak sinkronnya kegiatan unit usaha yang dijalankan dengan keadaan dan potensi Nagari akan memberikan Pendapatan Asli Nagari (PAN);
6. Adanya 7 UPK yang belum bertransformasi ke BUMNag Bersama;
7. Tidak dapat diikutinya kegiatan lomba TTG dan BUMNag, baik Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional karena tidak adanya anggaran;
8. Kurangnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari, Kecamatan dan Provinsi karena keterbatasan anggaran.

3. Bidang Pemerintahan Nagari :

1. Banyaknya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman Pemerintah Nagari tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari;
4. Kurangnya Sosialisasi dari BPJS Kesehatan Cabang Painan ke Nagari dengan melibatkan Kecamatan dan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan;
5. Belum memenuhi syarat sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Belum terkelolanya Penataan Aset Nagari dan kurangnya dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;
7. Belum optimalnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi antara Pemerintah Nagari, Kecamatan dan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum mencukupinya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di tiap Kecamatan;
2. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi di Nagari;
3. Masih adanya budaya malu masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi KB;
4. Tidak adanya minat akseptor MOP dalam Peningkatan Kesertaan KB Pria yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
5. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Duta Genre;

6. Keterbatasan anggaran untuk Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi dari Kabupaten sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah dibentuk dari Nagari dan Kecamatan, sedangkan lokasi sasaran yang akan dilakukan pendampingan memerlukan biaya transportasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;
7. Tidak tersedianya anggaran penanganan komplikasi Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan KB MKJP oleh DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan, karena anggarannya sudah disediakan pada Dinas Kesehatan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra/RPJMD);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar internasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 3) Penghargaan-penghargaan yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2021-2023;
- 4) Lain-lain yang dianggap perlu;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238); maka Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Visi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

2.1.2. Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan

Dari 6 Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan yang ingin diwujudkan mengacu kepada Misi Nomor 1, 2, 4, 5, 6, yaitu :

Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
Demokratis dan Transparan;

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;

Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan
Wisata yang Nyaman dan Berkesan;

Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan
Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;

Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenang dan Dinamis;

2.1.3. Tujuan Dinas

“Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga
Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas”.

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	2.	3.	4.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A 82,00%
		Persentase Nagari Mandiri	12,64% (23 Nagari)
2.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

Tabel 2.2. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Desa	Rp. 4.694.110.033	Rp. 4.801.684.973
2.	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 2.498.200	Rp. 2.498.200
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.226.718.448	Rp. 2.269.718.332
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 464.466.884	Rp. 714.466.816
5.	Pengendalian Penduduk	Rp. 263.400.000	Rp. 263.400.000
6.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.483.316.024	Rp. 3.483.316.024
7.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.388.600.000	Rp. 2.388.600.000
Total (Rp.)		Rp. 13.523.109.589	Rp. 13.923.684.345

Sumber Data : Program Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

2.3. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Tabel 2.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja/Sasaran Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Kulaitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas	1. Kecepatan Pelayanan Pemerintahan Nagari Pada Masyarakat	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A
		2. Persentase Keaktifan Kelembagaan Masyarakat Dalam Membangun Nagari		Persentase Nagari Mandiri	4,95% (9 Nagari)	6,04% (11 Nagari)	12,64% (23 Nagari)	15,38% (28 Nagari)	18,13% (33 Nagari)	20,88% (38 Nagari)
		3. Persentase Keaktifan Kelompok Kegiatan								
		4. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,18%	1,15%	1,15%	1,14%	1,13%	1,12%
		5. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Memiliki Anak atau Ingin Anak tapi Ditunda, Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi (Unmet Need)								
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		100	100	100	100	100	100

Sumber Data : SK Kepala Dinas Nomor : 800/13/Kpts/DPM DPPKB-PS/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Penilaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bila mana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu : semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Penilaian hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan klasifikasi penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Klasifikasi Penilaian Kinerja	Predikat
1.	85%-100%	Sangat Baik
2.	69%-84%	Baik
3.	53%-68%	Cukup
4.	<53%	Gagal

Sumber Data : Klasifikasi Penilaian Kinerja

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A 82,00%	A 80,17%	97,77%
		Persentase Nagari Mandiri	12,64% (23 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	139,10%
2.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15%	1,35%	82,61%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%
Total					79,87%

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja diatas dengan mencakup penetapan indikator kinerja yang digunakan dalam menilai pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026; dan 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023; yang merupakan pelaksanaan kegiatan selama 1 Tahun.

Pada hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dari 3 Sasaran Strategis dengan pengukuran rata-rata capaian kinerja adalah 79,87%, dengan hasil tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan dari klasifikasi penilaian kinerja termasuk Baik. Hasil pengukuran kinerja yang Baik Tahun ini diharapkan dapat ditingkatkan lagi menjadi Sangat Baik di masa yang akan datang.

3.3. Capaian Kinerja

Sasaran Strategis :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	A 82,00%	A 80,17%	97,77%
2.	Persentase Nagari Mandiri	%	12,64% (23 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	139,10%
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,15%	1,35%	82,61%
4.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	%	100	0	0,00%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					79,87%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa capaian rata-rata 4 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 sasaran strategis yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 79,87%, dengan uraian sebagai berikut : sebanyak 2 indikator kinerja nilai predikatnya Sangat Baik, terdiri dari : Nilai AKIP Perangkat Daerah capaian kinerjanya 97,77% dan Persentase Nagari Mandiri capaian kinerjanya 139,10%, selanjutnya terdapat 1 indikator kinerja nilai predikatnya Baik, yaitu : Laju Pertumbuhan Penduduk capaian kinerjanya 82,61% dan terdapat 1 indikator kinerja nilai predikatnya tidak dapat diukur, yaitu : Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah capaian kinerjanya 0,00%.

Indikator Kinerja

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Nomor : 713/657/LHE-AKIP/Insp-PS/III/2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai 80,17% dengan kategori A dengan pengertian Memuaskan, terdapat gambaran bahwa Instansi Pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan Pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator.

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 Koordinator, dengan rincian nilai sebagai berikut :

Tabel 3.4. LHE AKIP DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,95
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,41
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,69
4.	Evaluasi Internal	25,00	20,13
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		80,17
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Sumber Data : LHE AKIP DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja A (82,00%), terrealisasi kinerja A (80,17%) dan capaian kinerja 97,77%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk nilai predikatnya Sangat Baik.

2. Persentase Nagari Mandiri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa/Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang mempunyai ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar yang mencakup : infrastruktur yang memadai aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan Pemerintahan yang sudah Sangat Baik, dan Desa/Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang memiliki Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) $\geq 75\%$.

a. Jumlah Nagari Mandiri Tahun 2023

Terdapat 32 Nagari Mandiri pada Tahun 2023 dari 182 Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Lokasi Nagari Mandiri Tahun 2023

Tabel 3.5. Rekapitulasi Pemutakhiran Data IDM Status Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Nagari	IKS	IKE	IKL	IDM	Status IDM
1.	Pancung Soal	Kudo-Kudo Inderapura	0,8114	0,9167	0,9333	0,8871	Mandiri
2.	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	0,8571	0,8667	0,7333	0,8190	Mandiri
3.	Ranah Pesisir	Pelangai	0,7486	0,9667	1,0000	0,9051	Mandiri
4.	Lengayang	Kambang	0,8171	0,8333	0,8000	0,8168	Mandiri
5.	Lengayang	Lakitan	0,7714	0,8333	0,9333	0,8460	Mandiri
6.	Lengayang	Kambang Barat	0,8229	0,8167	0,8667	0,8354	Mandiri
7.	Lengayang	Lakitan Utara	0,8457	0,8333	0,8667	0,8486	Mandiri
8.	IV Jurai	Painan	0,9029	0,8667	1,0000	0,9232	Mandiri
9.	IV Jurai	Salido	0,9829	0,7833	0,9333	0,8998	Mandiri
10.	IV Jurai	Lumpo	0,8457	0,7500	0,8667	0,8208	Mandiri
11.	IV Jurai	Bunga Pasang Salido	0,8571	0,7000	1,0000	0,8524	Mandiri
12.	IV Jurai	Sago Salido	0,9486	0,8500	0,8667	0,8884	Mandiri
13.	IV Jurai	Painan Selatan Painan	0,9143	0,8333	1,0000	0,9159	Mandiri
14.	IV Jurai	Painan Timur Painan	0,8914	0,8000	1,0000	0,8971	Mandiri
15.	Bayang	Pasar Baru	0,9200	0,9500	0,8000	0,8900	Mandiri
16.	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai	0,8857	0,9000	0,6667	0,8175	Mandiri
17.	Sutera	Surantih	0,8400	0,9000	0,7333	0,8244	Mandiri
18.	Sutera	Amping Parak	0,7886	0,8500	1,0000	0,8795	Mandiri
19.	Linggo Sari Baganti	Air Haji	0,8629	0,7500	1,0000	0,8710	Mandiri
20.	Linggo Sari Baganti	Air Haji Barat	0,9200	0,6667	0,8667	0,8178	Mandiri

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Nagari	IKS	IKE	IKL	IDM	Status IDM
21.	Lunang	Lunang	0,9086	0,7833	0,8667	0,8529	Mandiri
22.	Lunang	Lunang Selatan	0,9429	0,9000	0,6667	0,8365	Mandiri
23.	Lunang	Lunang Dua	0,8800	0,8000	0,8000	0,8267	Mandiri
24.	Lunang	Lunang Tiga	0,8629	0,8167	0,8667	0,8487	Mandiri
25.	Basa Ampek Balai Tapan	Pasar Tapan	0,9600	0,8500	0,7333	0,8478	Mandiri
26.	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	0,8686	0,9667	0,8000	0,8784	Mandiri
27.	Basa Ampek Balai Tapan	Koto Anau Tapan	0,8057	0,6500	1,0000	0,8186	Mandiri
28.	Airpura	Lalang Panjang Inderapura	0,8171	0,8167	0,9333	0,8557	Mandiri
29.	Airpura	Tanah Bakali Inderapura	0,8971	0,7000	0,9333	0,8435	Mandiri
30.	Silaut	Sungai Sirah	0,8000	0,8833	0,8667	0,8500	Mandiri
31.	Silaut	Pasir Binjai	0,8000	0,7500	0,9333	0,8278	Mandiri
32.	Silaut	Lubuk Bunta	0,8114	0,7833	0,8667	0,8205	Mandiri

Sumber Data : Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa indikator kinerja Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 12,64% (23 Nagari), terrealisasi kinerja 17,58% (32 Nagari) dan capaian kinerja 139,10%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk nilai predikatnya Sangat Baik.

c. Faktor Keberhasilan Desa/Nagari Mandiri

Dalam hal ini ada beberapa Aspek Pencapaian yang harus terpenuhi oleh Desa/Nagari, diantaranya :

- Kebutuhan Dasar (Sandang, Pangan, dan Papan);
- Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur);
- Lingkungan;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.

d. Faktor Hambatan/Kendala Desa/Nagari Mandiri

Dalam hal ini ada beberapa Kendala Desa/Nagari, diantaranya :

- Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Desa/Nagari yang memiliki kompetensi pada bidang tersebut;
- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan di Desa/Nagari.

e. Solusi Desa/Nagari Mandiri

Dalam Penetapan Desa/Nagari Mandiri terhadap penyusunan perencanaan Nagari beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar, seperti : Paud, Poskesri, Pasar Desa, dll, sedangkan untuk kebutuhan dasar tersedianya ketahanan pangan Desa/Nagari dan dalam meningkatkan penempatan melalui pemanfaatan potensi Desa/Nagari dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Desa/Nagari.

f. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terkait dengan Desa/Nagari Mandiri

Program : Administrasi Pemerintahan Desa;
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurunnya Persentase Anak yang dilahirkan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi salah satu upaya untuk menekan, mengendalikan dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan cara Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, serta Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), maka dari itu upaya yang menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan tercapainya indikator kinerja untuk menekan, mengendalikan dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Terwujudnya Keluarga Bahagia

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15%	1,35%	82,61%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk dengan target kinerja 1,15%, terrealisasi kinerja 1,35% dan capaian kinerja 82,61%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut nilai predikatnya Baik.

- Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terkait dengan Laju Pertumbuhan Penduduk

Program : Program Pengendalian Penduduk;

Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan : - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Berbeda dan berubahnya inovasi dari tahun sebelumnya, sehingga inovasi tersebut belum bisa terlaksana dan diterapkan secara optimal, seperti yang diharapkan, karena belum dibentuknya Tim Khusus untuk melaksanakan inovasi yang diusulkan dan adanya kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan inovasi tersebut serta operator khusus inovasi yang membantu pelaksanaan kegiatan untuk melakukan upload dokumen, data terkait inovasi tersebut ke aplikasi inovasi dan ke klinik inovasi di Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan.

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100, terrealisasi kinerja 0 dan capaian kinerja 0,00%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut nilai predikatnya tidak dapat diukur, karena tidak dapat terlaksananya inovasi tersebut pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Membandingkan antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.8. Target Kinerja dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A 82,00%	A 80,17%	97,77%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.801.684.973	Rp. 4.621.848.359	96,25%
						Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 2.498.200	Rp. 2.486.000	99,51%
		Persentase Nagari Mandiri	12,64% (23 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	139,10%	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.269.718.332	Rp. 2.257.145.357	99,45%
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 714.466.816	Rp. 707.762.924	99,06%
2.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15%	1,35%	82,61%	Pengendalian Penduduk	Rp. 263.400.000	Rp. 225.330.499	85,55%
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.483.316.024	Rp. 3.119.893.230	89,57%
						Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.388.600.000	Rp. 2.126.290.000	89,02%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%				
Total					79,87%		Rp. 13.923.684.345	Rp. 13.060.756.369	93,80%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Target RPJMD dan Renstra

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;

Tabel 3.9. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023	
			Target	Rp. 000
1.	2.	3.	4.	5.
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Rp. 12.325.000
1.	Program Penataan Desa	Jumlah Nagari Baru Yang Terbentuk	9	Rp. 6.250.000
		Jumlah Peningkatan Status Nagari Mandiri	13	
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa	70	Rp. 425.000
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari Yang Memiliki Pengelolaan Administrasi Yang Baik	90	Rp. 3.800.000
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dasawisma Maju	590	Rp. 1.850.000
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Rp. 7.550.000
5.	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25	Rp. 200.000
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,78	Rp. 6.500.000
7.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Organisasi KB yang Aktif	52,00	Rp. 850.000

Sumber Data : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Tabel. 3.10. T-27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023	
			Target	Rp. 000
1.	2.	3.	4.	5.
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Rp. 6.582.400
1.	Program Penataan Desa	Jumlah Nagari Baru Yang Terbentuk	9	Rp. 1.765.000
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa	70	Rp. 280.000
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari Yang Memiliki Pengelolaan Administrasi Yang Baik	85	Rp. 3.597.400
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dasawisma Maju	590	Rp. 940.000
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Rp. 13.682.600
5.	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25	Rp. 1.200.000
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,80	Rp. 5.692.600
7.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Organisasi KB yang Aktif	60	Rp. 1.000.000
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Usulan Daerah dilaksanakan	70%	Rp. 5.790.000

Sumber Data : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja serta Solusi

a. Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan Nagari terhadap Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mulainya penerapan teknologi dengan menggunakan aplikasi, pada beberapa sektor pendukung program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan *stakeholders* dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Faktor Kegagalan Pencapaian Kinerja :

1. Masih kurangnya tenaga penyuluh PKB/PLKB di Balai Penyuluh KB yang ditempatkan pada masing-masing Kecamatan, yang akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut Ber-KB;
2. Masih kurangnya pengelolaan usaha di Nagari, yaitu : Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang masih mengalami kemacetan dalam simpan pinjam di Nagari, sehingga menyebabkan terpengaruhnya Pendapatan Asli Nagari (PAN);
3. Masih kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Nagari, Kecamatan dan Kabupaten secara bertahap dan berjenjang dari Nagari ke Kecamatan hingga ke Kabupaten;
4. Masih kurangnya pemanfaatan Nagari untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari dalam mengembangkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Nagari dengan mengajak masyarakat terlibat untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di Nagari;
5. Masih kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Solusi yang telah dilakukan :

1. Meningkatnya Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mulai Meningkatnya Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Analisis Program dan Kegiatan

Tabel 3.11. Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.801.684.973	Rp. 4.621.848.359	96,25%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.747.991.569	Rp. 3.602.083.538	96,11%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 491.845.861	Rp. 482.699.491	98,14%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 278.931.543	Rp. 266.712.480	95,62%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 282.916.000	Rp. 270.352.850	95,56%
2.	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 2.498.200	Rp. 2.486.000	99,51%
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Rp. 2.498.200	Rp. 2.486.000	99,51%
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.269.718.332	Rp. 2.257.145.357	99,45%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.269.718.332	Rp. 2.257.145.357	99,45%
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 714.466.816	Rp. 707.762.924	99,06%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 714.466.816	Rp. 707.762.924	99,06%

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Pengendalian Penduduk	Rp. 263.400.000	Rp. 225.330.499	85,55%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 263.400.000	Rp. 225.330.499	85,55%
6.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.483.316.024	Rp. 3.119.893.230	89,57%
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 1.307.250.024	Rp. 1.153.310.405	88,22%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 380.000.000	Rp. 360.100.000	94,76%
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 996.566.000	Rp. 908.309.225	91,14%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp. 799.500.000	Rp. 698.173.600	87,33%
7.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.388.600.000	Rp. 2.126.290.000	89,02%
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.388.600.000	Rp. 2.126.290.000	89,02%
Total Anggaran (Rp.)		Rp. 13.923.684.345	Rp. 13.060.756.369	93,80%

Sumber Data : Program dan Kegiatan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Pada Aplikasi SIPD Kemendagri dan Realisasi Anggaran Fungsional Desember Tahun 2023;

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023; melakukan perjanjian kinerja pada masing-masing atasan langsung terdapat program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut pada program dan kegiatan Tahun 2023 sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 yang bersumber dari DAU/APBD, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, terdapat 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan anggaran Rp. 4.801.684.973,- terrealisasi anggaran Rp. 4.621.848.359,- capaian program 96,25%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, terdiri dari kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 3.747.991.569,- terrealisasi anggaran Rp. 3.602.083.538,- capaian kegiatan 96,11%.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 491.845.861,- terrealisasi anggaran Rp. 482.699.491,- capaian kegiatan 98,14%.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 278.931.543,- terrealisasi anggaran Rp. 266.712.480,- capaian kegiatan 95,62%.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 282.916.000,- terrealisasi anggaran Rp. 270.352.850,- capaian kegiatan 95,56%.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan anggaran Rp. 2.498.200,- terrealisasi anggaran Rp. 2.486.000,- capaian program 99,51%.

Program Peningkatan Kerjasama Desa terdiri dari kegiatan :

- Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan anggaran Rp. 2.498.200,- terrealisasi anggaran Rp. 2.486.000,- capaian kegiatan 99,51%.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 2.269.718.332,- terrealisasi anggaran Rp. 2.257.145.357,- capaian program 99,45%.

Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 2.269.718.332,- terrealisasi anggaran Rp. 2.257.145.357,- capaian kegiatan 99,45%.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 714.466.816,- terrealisasi anggaran Rp. 707.762.924,- capaian program 99,06%.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari kegiatan :

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 714.466.816,- terrealisasi anggaran Rp. 707.762.924,- capaian kegiatan 99,06%.

5. Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 263.400.000,- terrealisasi anggaran Rp. 225.330.499,- capaian program 85,55%.

Program Pengendalian Penduduk terdiri dari kegiatan :

- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 263.400.000,- terrealisasi anggaran Rp. 225.330.499,- capaian kegiatan 85,55%.

6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp. 3.483.316.024,- terrealisasi anggaran Rp. 3.119.893.230,- capaian program 89,57%.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari kegiatan :

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan anggaran Rp. 1.307.250.024,- terrealisasi anggaran Rp. 1.153.310.405,- capaian kegiatan 88,22%.
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan anggaran Rp. 380.000.000,- terrealisasi anggaran Rp. 360.100.000,- capaian kegiatan 94,76%.
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 996.566.000,- terrealisasi anggaran Rp. 908.309.225,- capaian kegiatan 91,14%.
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan anggaran Rp. 799.500.000,- terrealisasi anggaran Rp. 698.173.600,- capaian kegiatan 87,33%.

7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran Rp. 2.388.600.000,- terrealisasi anggaran Rp. 2.126.290.000,- capaian program 89,02%.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari kegiatan :

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran Rp. 2.388.600.000,- terrealisasi anggaran Rp. 2.126.290.000,- capaian kegiatan 89,02%.

Dari 7 program tersebut total pagu anggaran Rp. 13.923.684.345,- terrealisasi anggaran Rp. 13.060.756.369,- capaian program 93,80%, maka berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan capaian kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan termasuk predikat Sangat Baik melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Untuk mencapai sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang direncanakan pada masing-masing Bidang, agar terlaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026; dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.12. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.801.684.973	Rp. 4.621.848.359	96,25%
2.	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 2.498.200	Rp. 2.486.000	99,51%
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.269.718.332	Rp. 2.257.145.357	99,45%
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 714.466.816	Rp. 707.762.924	99,06%
5.	Pengendalian Penduduk	Rp. 263.400.000	Rp. 225.330.499	85,55%
6.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.483.316.024	Rp. 3.119.893.230	89,57%
7.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.388.600.000	Rp. 2.126.290.000	89,02%
Total Anggaran (Rp.)		Rp. 13.923.684.345	Rp. 13.060.756.369	93,80%

Sumber Data : Program dan Kegiatan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Pada Aplikasi SIPD Kemendagri dan Realisasi Anggaran Fungsional Desember Tahun 2023;

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 total pagu anggaran Rp. 13.923.684.345,- terrealisasi anggaran Rp. 13.060.756.369,- capaian program 93,80%, maka berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan capaian kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan termasuk predikat Sangat Baik melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dilihat dari pelaksanaan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan penganggaran yang baik, serta di evaluasi masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan oleh Pengguna Anggaran (PA) selaku Kepala Dinas bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang untuk mencapai sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang direncanakan pada masing-masing Bidang, agar terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026; dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023; serta sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dan bertingkat dengan atasan langsung, yaitu : mulai dari Kepala Dinas (Eselon II) dengan bertanggungjawab kepada Bupati, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Eselon III) dengan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Fungsional Tertentu (Eselon IV) dengan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, serta Staf dengan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang ataupun Sekretaris Dinas, yang telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan masing-masing atasan langsung, agar anggaran dan realisasi anggaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan, sebagai berikut :

a. Capaian Sasaran Strategis

Dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdiri dari 4 indikator kinerja, maka capaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
 - Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja A (82,00%), terrealisasi kinerja A (80,17%), capaian indikator kinerja 97,77%.
 - Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 12,60% (23 Nagari) terrealisasi kinerja 17,58% (32 Nagari), capaian indikator kinerja 139,10%.
2. Terwujudnya Keluarga Bahagia, terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
 - Laju Pertumbuhan Penduduk dengan target kinerja 1,15% terrealisasi kinerja 1,35%, capaian indikator kinerja 82,61%.
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
 - Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100, terrealisasi kinerja 0, capaian indikator kinerja 0,00%.

Dari 4 indikator kinerja tersebut, terdapat 2 indikator kinerja terlaksana dengan Sangat Baik melebihi target yang telah ditetapkan, selanjutnya terdapat 1 indikator kinerja nilai predikatnya Baik dan terdapat 1 indikator kinerja nilai predikatnya tidak dapat diukur, karena tidak dapat terlaksananya inovasi tersebut.

b. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan rata-rata capaian indikator kinerja adalah 100%, dimana indikator kinerja mulai dari yang tertinggi hingga sampai dengan indikator kinerja terendah, yaitu :

- Capaian Indikator Kinerja Tertinggi :
Persentase Nagari Mandiri dengan capaian kinerjanya adalah 139,10%, selanjutnya indikator kinerja dengan Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerjanya adalah 97,77% dan indikator setelahnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian indikator kinerjanya adalah 82,61%.
- Capaian Indikator Kinerja Terrendah :
Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan capaian indikator kinerja 0,00%.

c. Capaian Realisasi Anggaran

Dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 yang bersumber dari DAU/APBD, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, terdapat 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan anggaran Rp. 4.801.684.973,- terrealisasi anggaran Rp. 4.621.848.359,- capaian program 96,25%.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan anggaran Rp. 2.498.200,- terrealisasi anggaran Rp. 2.486.000,- capaian program 99,51%.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 2.269.718.332,- terrealisasi anggaran Rp. 2.257.145.357,- capaian program 99,45%.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 714.466.816,- terrealisasi anggaran Rp. 707.762.924,- capaian program 99,06%.
5. Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 263.400.000,- terrealisasi anggaran Rp. 225.330.499,- capaian program 85,55%.
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp. 3.483.316.024,- terrealisasi anggaran Rp. 3.119.893.230,- capaian program 89,57%.
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran Rp. 2.388.600.000,- terrealisasi anggaran Rp. 2.126.290.000,- capaian program 89,02%.

Dari 7 program tersebut total pagu anggaran Rp. 13.923.684.345,- terrealisasi anggaran Rp. 13.060.756.369,- capaian program 93,80%, maka berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan capaian kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan termasuk predikat Sangat Baik melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

4.2. Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja dimasa yang akan datang agar dapat ditingkatkan capaian kinerja menjadi Sangat Baik, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang, yaitu :

- Perencanaan :

1. Perlunya peningkatan kemampuan dan keahlian kepada bagian perencanaan dengan bimbingan teknis terutama operator khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran untuk pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang baik dalam penyusunan perencanaan kinerja Dinas.
2. Melakukan inovasi pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang guna mendukung harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh masing-masing OPD lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Meningkatkan kerjasama di bagian perencanaan dengan merekatkan koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dengan baik dilingkungan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun dilingkungan eksternal, yaitu : dengan OPD lintas sektor terkait secara cruscutting serta dengan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya, guna mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan agar berjalan baik sesuai dengan harapan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Sumber Daya Manusia :

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, seharusnya setiap pejabat/atasan langsung memiliki personil 1-2 Orang Staf dan seharusnya juga untuk masing-masing bidang memiliki personil 5 Orang Staf karena untuk pelayanan publik yang akan dilakukan pembinaan dan pengawasan 182 Nagari, 15 Kecamatan serta 15 Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

- Sarana dan Prasarana :

Kurang memadainya Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Pesisir Selatan mulai dari kursi dan meja tidak layak pakai, bangunan gedung kantor yang mengalami kerusakan (seperti : atap bocor, tidak adanya lagi gudang tempat penyimpanan arsip), sering membaliknya lampu akibat rendahnya watt lampu kantor yang perlu perbaikan, tidak berfungsinya AC/Kipas Angin di kantor, kurangnya kecepatan Wifi kantor untuk mengakses internet yang menggunakan aplikasi kantor, serta perlu perbaikannya kendaraan kantor : Mobil dan Motor sesuai yang tercatat pada Aset KIB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

- Anggaran :

Masih kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, karena 182 Nagari yang akan dilakukan pembinaan, monitoring dan dievaluasi kinerjanya ke lapangan, serta terdapat 15 Balai Penyuluh Keluarga Berencana di 15 Kecamatan yang sumber anggarannya dari DAU/APBD, DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Painan, 12 Februari 2024

Plt. KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN


SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

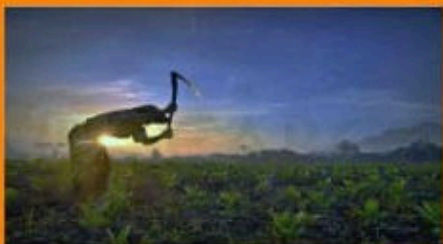


DPMDPPKB

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023





**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

BUPATI PESISIR SELATAN,

( **RUSMA YUL ANWAR**)

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN**

( **ZULKIFLI, S.Sos.**)
NIP. 19690218 199303 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82,00%)
		Persentase Nagari Mandiri	12,64%
2.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 4.801.684.973	APBD
2.	Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 2.498.200	APBD
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.269.718.332	APBD
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 714.466.816	APBD
5.	Pengendalian Penduduk	Rp. 263.400.000	DAK Non Fisik KB
6.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.483.316.024	APBD, DAK Non Fisik KB
7.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.388.600.000	DAK Non Fisik KB
Jumlah		Rp. 13.923.684.345	

Painan, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,
BUPATI PESISIR SELATAN,

( **MUSMA YULIANWAR**)

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

( **(ZULKIELI, S.Sos.)**
NIP. 19690218 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA,
PENGANDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/13/Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam acuan kinerja yang dipergunakan dalam penyusunan dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Laporan Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan Tolak Ukur dalam Penilaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DINAS,

ZULKIELI S.Sos.
NIP. 19690218 1993 03 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800/13/Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

TANGGAL 6 Januari 2023

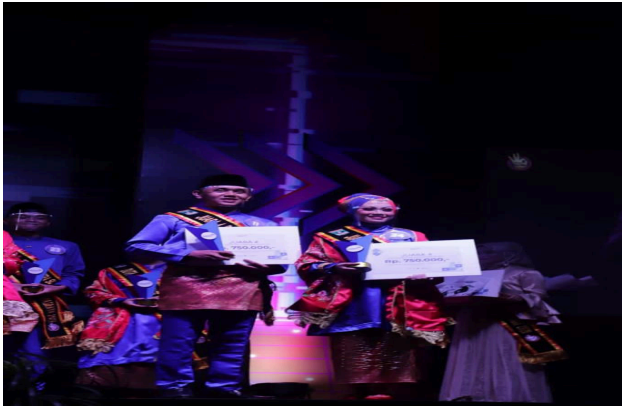
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja/Sasaran Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas	1. Kecepatan Pelayanan Pemerintahan Nagari Pada Masyarakat	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A
		2. Persentase Keaktifan Kelembagaan Masyarakat Dalam Membangun Nagari		Persentase Nagari Mandiri	4,95% (9 Nagari)	6,04% (11 Nagari)	12,64% (23 Nagari)	15,38% (28 Nagari)	18,13% (33 Nagari)	20,88% (38 Nagari)
		3. Persentase Keaktifan Kelompok Kegiatan								
		4. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,18%	1,15%	1,15%	1,14%	1,13%	1,12%
		5. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Memiliki Anak atau Ingin Anak tapi Ditunda, Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi (Unmet Need)								
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		100	100	100	100	100	100

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 6 Januari 2023KEPALA DINAS,
ZULKIFLI S.Sos.
NIP. 19690218 1993 03 1 003

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Juara Duta GenRe RU 4 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Hotel Grand Zuri Padang, 3 April 2021	
2.	Juara Duta GenRe Sosial Media Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Hotel Grand Zuri Padang, 3 April 2021	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Piagam Penghargaan Atas Kerjasama Serta Suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020	KPU Kab. Pesisir Selatan	Painan, 19 April 2021	 A certificate of appreciation from the KPU of Pesisir Selatan Regency. It features a red ribbon with the KPU logo and the text 'Piagam Penghargaan' in large orange script. Below, it states 'Diberikan Kepada' followed by the name of the official from the Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. The date is 'Painan, 19 April 2021' and the official is 'Ketua Epaldi Bahar'.
4.	Terbaik II Kategori Kabupaten Pelaksana Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Dalam Rangka HARGANAS XXVIII Tahun 2021 Tingkat Provinsi Sumatera Barat	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Padang, 28 Juni 2021	 A certificate of appreciation from the BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. It has a blue border and features the BKKBN logo at the top. The text 'PIAGAM PENGHARGAAN' is in bold. It states 'Diberikan kepada:' followed by the name of the official from the Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. It also mentions 'Sebagai terbaik II Kategori Kabupaten Pelaksana Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Dalam Rangka HARGANAS XXVIII Tahun 2021 Tingkat Provinsi Sumatera Barat'. The date is 'Padang, 28 Juni 2021' and the official is 'Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Fatmawati, ST., M.Eng'.

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Harapan I Lomba Parade dan Yel-Yel Pada Jambore Kader PPK Berprestasi Ke-XVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman, 8 Juli 2021	
6.	Harapan I Lomba Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dengan Prinsip 3R <i>Reuse, Reduce dan Recycle</i> (Pokja III) Pada Jambore Kader PPK Berprestasi ke XVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman, 8 Juli 2021	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
7.	Harapan II Lomba Ekspose Ketua TP-PPK Nagari/Desa/Kelurahan (Sekretaris) Pada Jambore Kader PPK Berprestasi ke XVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman, 8 Juli 2021	
8.	Harapan II MTQ Nasional ke-39 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Gubernur Sumatera Barat	Padang Panjang, 19 November 2021	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

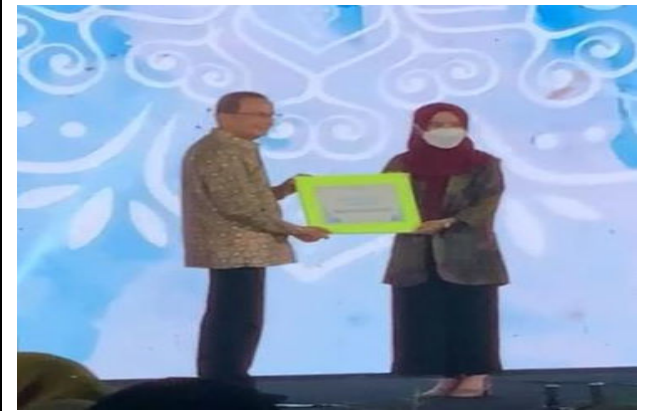
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Juara 2 Musikalisasi Puisi Se-Poltekes Kemenkes Indonesia Tahun 2021	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES-RI)	Padang, 28 November 2021	
10.	Harapan III Lomba Gerakan PKK Bidang UP2K-PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Painan, 7 Desember 2021	

Sumber Data : Bagian dan Bidang di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Penghargaan Grand Final Duta GenRe Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	Bupati Pesisir Selatan	Painan, 8 Maret 2022	
2.	Piagam Penghargaan A.n Dabiruddin Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Meningkatkan Produktifitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Pesisir Selatan	Bupati Pesisir Selatan	Painan, 14 April 2022	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Penghargaan Beasiswa GenRe Berprestasi A.n Wahyuni Firma Aulia (Duta GenRe Kab. Pesisir Selatan) Duta GenRe Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Hotel Grand Zuri Padang, 4 Juni 2022	
4.	Juara Duta GenRe Best Social Media Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 A.n Bima Satria Wahyudi (Duta GenRe Kab. Pesisir Selatan)	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Hotel Grand Zuri Padang, 4 Juni 2022	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Juara 3 A.n Kevin Julianda (SMAN 1 Koto XI Tarusan) PIK-Remaja Terbaik Se-Sumatera Barat Tahun 2022	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Hotel Grand Zuri Padang, 4 Juni 2022	
6.	Juara 5 A.n Saskia Putri Sukmana (Duta GenRe Kab. Pesisir Selatan) Duta GenRe Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Hotel Grand Zuri Padang, 4 Juni 2022	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
7.	Terbaik III Kategori Kabupaten Pelaksanaan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Dalam Rangka HARGANAS XXIX Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Sumatera Barat	Pangeran Beach Hotel Padang, 29 Juni 2022	
8.	Penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Koto Panjang Kabupaten Pesisir Selatan, Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka HARGANAS XXIX Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Pangeran Beach Hotel Padang, 29 Juni 2022	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Juara II Lomba Yel-Yel Devile Kontigen Kabupaten/Kota Lomba Jambore Kader PKK Berprestasi Ke-XIX Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Lubuk Basung, 19 Juli 2022	
10.	Harapan I Yel-Yel dan Mars Dasawisma Kabupaten/Kota Lomba Jambore Kader PKK Berprestasi Ke-XIX Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Lubuk Basung, 19 Juli 2022	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
11.	Harapan III Bidang Pokja IV Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Lubuk Basung, 19 Juli 2022	
12.	Penghargaan Penempatan Mahasiswa KKN di Kab. Pesisir Selatan	ISI Padang Panjang	Painan, 22 Juli 2022	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
13.	Penghargaan MTQ Nasional Ke-40 Tingkat Kab. Pesisir Selatan di Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022	Gubernur Prov. Sumatera Barat	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan, 22 Juli 2022	
14.	Juara 3 A.n Amin Mustakin Nagari Pasir Binjai Kec. Silaut Inovasi Produksi Pupuk Organik Berbasis Ramah Lingkungan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Gubernur Sumatera Barat	Padang, 1 November 2022	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat, Tanggal Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala /Foto Saat Menerima Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.
15.	Penghargaan Wali Nagari Terbaik Se-Kabupaten Pesisir Selatan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (KEMENDES PD TT-RI)	Painan, 26 Desember 2022	

Sumber Data : Bagian dan Bidang di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022

TAHUN 2023

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Juara II Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan Alat Pengolah Gambir Kab. Pesisir Selatan Tingkat Prov. Sumatera Barat Tahun 2023	Gubernur Prov. Sumatera Barat	Refdi Harimon dibawah Naungan DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan	Kantor Gubernur Prov. Sumatera Barat, 23 Mei 2023	
4.	Penghargaan dari Universitas PGRI Sumatera Barat ke DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan serta Pemberian Sertifikat Magang ke Mahasiswi Universitas PGRI Sumatera Barat	Mahasiswi Universitas PGRI Sumatera Barat	DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan	Ruangan Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan, 9 Juni 2023	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Pemberian Dokumen IDM dan Penandatanganan Kerjasama terkait Status Desa/Nagari IDM Tahun 2023	Kemendesa PDTT-RI melalui Tenaga Ahli Kab. Pesisir Selatan	DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	Ruang Rapat DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan, 22 Juni 2023	
6.	Juara Umum Kec. Pancung Soal Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 dan Jambore Kader PKK Tingkat Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023	Tim Penggerak PKK Prov. Sumatera Barat	Tim Penggerak PKK Kab. Pesisir Selatan dibawah Naungan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	Gedung Painan Convention Center (PCC), 24 Juni 2023	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	Harapan I Lomba Bermain Peran (PAREDI) Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Tim Penggerak PKK Prov. Sumatera Barat	Tim Penggerak PKK Kab. Pesisir Selatan dibawah Naungan DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan	Kota Bukittinggi, 19 Juli 2023	
8.	Harapan III Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Tim Penggerak PKK Prov. Sumatera Barat	Tim Penggerak PKK Kab. Pesisir Selatan dibawah Naungan DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan	Kota Bukittinggi, 19 Juli 2023	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.	Juara 1 Pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) Terbaik Semester 1 Tahun 2023	Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar	DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	Hotel Santika Padang, 22 Juli 2023	
10.	Juara 2 Program Bapak Asuh Anak Stunting Tahun 2023	Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar	DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	Hotel Santika Padang, 22 Juli 2023	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	Harapan 2 Pelaksanaan Mini Loka Karya Terbaik Semester 1 Tahun 2023 Tingkat Prov. Sumatera Barat	Gubernur Prov. Sumatera Barat	DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan	Hotel Santika Padang, 22 Juli 2023	
12.	Pada Klaster II Lingkungan Keluarga Kabupaten Layak Anak Kategori Madya Tahun 2023	Bupati Kab. Pesisir Selatan	DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan	Kantor Bupati Kab. Pesisir Selatan, 29 Agustus 2023	

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	Dalam Memfasilitasi Mahasiswa Pada Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2023	UIN Imam Bonjol Padang	DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	Ruang Rapat DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan, 4 Desember 2023	
14.	Kab. Pesisir Selatan Cakupan Pelaporan SIGA Terbaik pada Hari Momentum Pelayanan KB	Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar	DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	Pangeran Beach Hotel Padang, 20 Desember 2023	

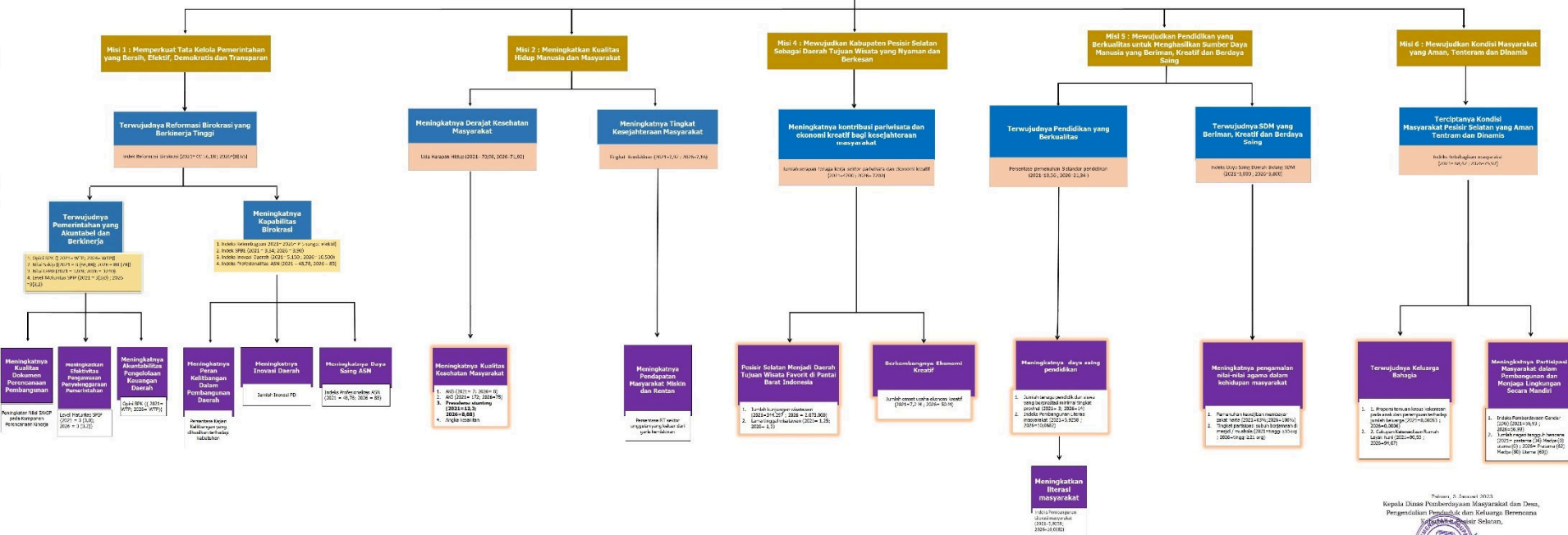
**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

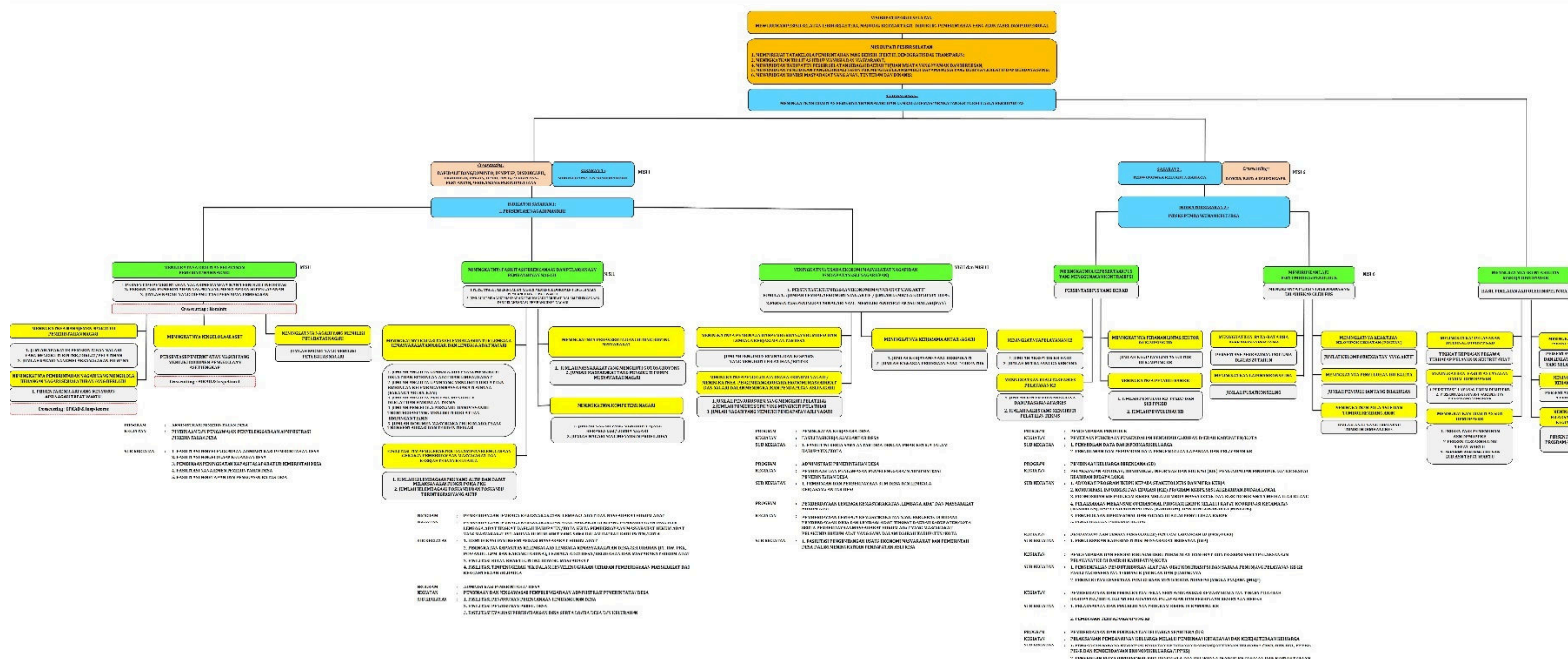
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	Terbaik VI Kategori Perangkat Daerah Kualifikasi Informatif	Bupati Kab. Pesisir Selatan	DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	Kantor Bupati Kab. Pesisir Selatan, 22 Desember 2023	

Sumber Data : Bagian dan Bidang di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

The diagram illustrates a four-level hierarchy of strategic planning, represented by four downward-pointing arrows of increasing size. The levels are:

- VISI** (Vision) - The top level, represented by a small blue arrow.
- MISI** (Mission) - The second level, represented by a medium-sized orange arrow.
- Kinerja Strategis Daerah** (Regional Strategic Performance) - The third level, represented by a large green arrow.
- Kinerja Strategis Pelayanan Daerah** (Regional Service Performance) - The bottom level, represented by the largest red arrow.



[illegible]

REKAPITULASI DATA INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016 S/D 2023

NO.	STATUS IDM	TAHUN 2016			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		JUMLAH NAGARI		%	JUMLAH NAGARI		%	JUMLAH NAGARI		%	JUMLAH NAGARI		%	JUMLAH NAGARI		%	JUMLAH NAGARI		%	JUMLAH NAGARI		%
1.	MANDIRI	3	NAGARI	1,65	4	NAGARI	2,20	7	NAGARI	3,85	7	NAGARI	3,85	9	NAGARI	4,95	18	NAGARI	9,89	32	NAGARI	17,58
2.	MAJU	13	NAGARI	7,14	23	NAGARI	12,64	28	NAGARI	15,38	33	NAGARI	18,13	42	NAGARI	23,08	70	NAGARI	38,46	93	NAGARI	51,10
3.	BERKEMBANG	53	NAGARI	29,12	98	NAGARI	53,85	113	NAGARI	62,09	125	NAGARI	68,68	129	NAGARI	70,88	92	NAGARI	50,55	57	NAGARI	31,32
4.	TERTINGGAL	105	NAGARI	57,69	56	NAGARI	30,77	33	NAGARI	18,13	17	NAGARI	9,34	2	NAGARI	1,10	2	NAGARI	1,10	0	NAGARI	0,00
5.	SANGAT TERTINGGAL	8	NAGARI	4,40	1	NAGARI	0,55	1	NAGARI	0,55	0	NAGARI	0,00	0	NAGARI	0,00	0	NAGARI	0,00	0	NAGARI	0,00
JUMLAH		182	NAGARI		182	NAGARI		182	NAGARI		182	NAGARI		182	NAGARI		182	NAGARI		182	NAGARI	

Mengetahui :

Kepala Dinas,

ZULKIFLI, S.Sos.
 NIP. 19690218 1993 03 1 003

Sasaran 9 : Terwujudnya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	OPD
9.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Persen	54,29%	58,37%	107,52%	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 263.400.000	Rp. 225.330.499	DPMDPPKB
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.483.316.024	Rp. 3.119.893.230	DPMDPPKB
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.388.600.000	Rp. 2.126.290.000	DPMDPPKB
Rata-Rata Capaian					107,52%		Rp. 6.135.316.024	Rp. 5.471.513.729	

Analisis Capaian Indikator Kinerja yang perlu dipenuhi :

1. Formulasi/Penjelasan tentang Indikator Kinerja (rumus atau uraian sesuai dengan aturan)

: Tujuan Pembangunan Keluarga ini diarahkan pada pencapaian Keluarga Berkualitas, Ketahanan dan Sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Indikator Kinerja tentang Indeks Pembangunan Keluarga dengan Dimensi Kemandirian mempunyai Target Kinerja Tahun 2023 adalah 45,23% dari (5.181 Keluarga), Kebahagiaan mempunyai Target Kinerja Tahun 2023 adalah 65,23% dari (7.472 Keluarga), dan Ketentraman mempunyai Target Kinerja Tahun 2023 adalah 52,41% dari (6.005 Keluarga), maka Indikator Kinerja tentang Indeks Pembangunan Keluarga dari 3 Dimensi tersebut mempunyai Rata-Rata Target Kinerja Tahun 2023 adalah 54,29% dari (6.219 Keluarga), Realisasi Kinerja adalah 58,37% dan Capaian (%) adalah 107,52%.

2. Uraian singkat tentang Indikator Kinerja termasuk data dukung pencapaian target

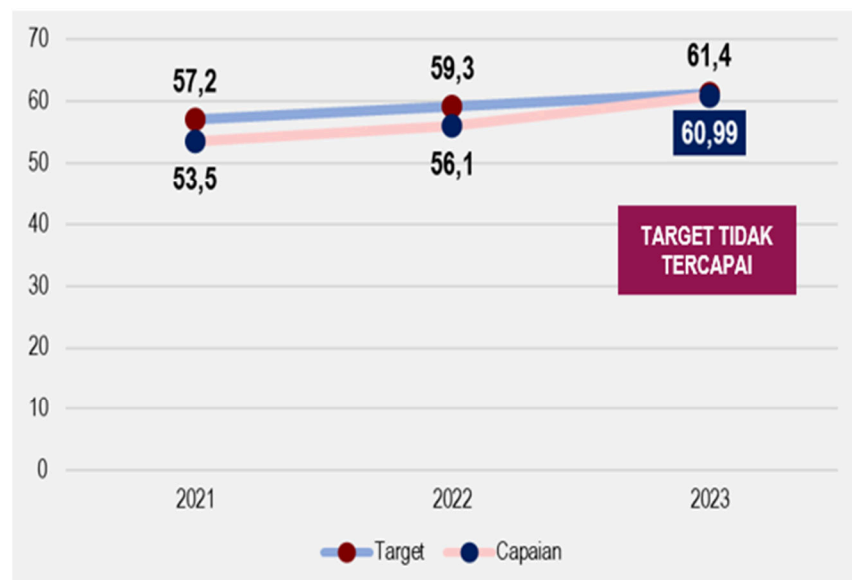
: Indikator Kinerja tentang Indeks Pembangunan Keluarga dengan 3 Dimensi, yaitu : Kemandirian, Kebahagiaan dan Ketentraman.

Data yang dihasilkan :

- Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pendampingan, Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Setiap Bulan;
- Melakukan Pengukuran Keluarga yang memenuhi 3 unsur dimensi tersebut;
- Melakukan Rekap Data Keluarga Setiap Bulan pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan mulai dari Keluarga di Nagari hingga Kecamatan dengan menggunakan Aplikasi BKKBN, yaitu : Pemutakhiran Perjanjian Kinerja (PK) dan Sistem Informasi Keluarga (Siga);
- Jumlah Keluarga yang menerima Bantuan Sosial atau Hibah dari BKKBN baik Sarana dan Prasarana untuk Kab. Pesisir Selatan;

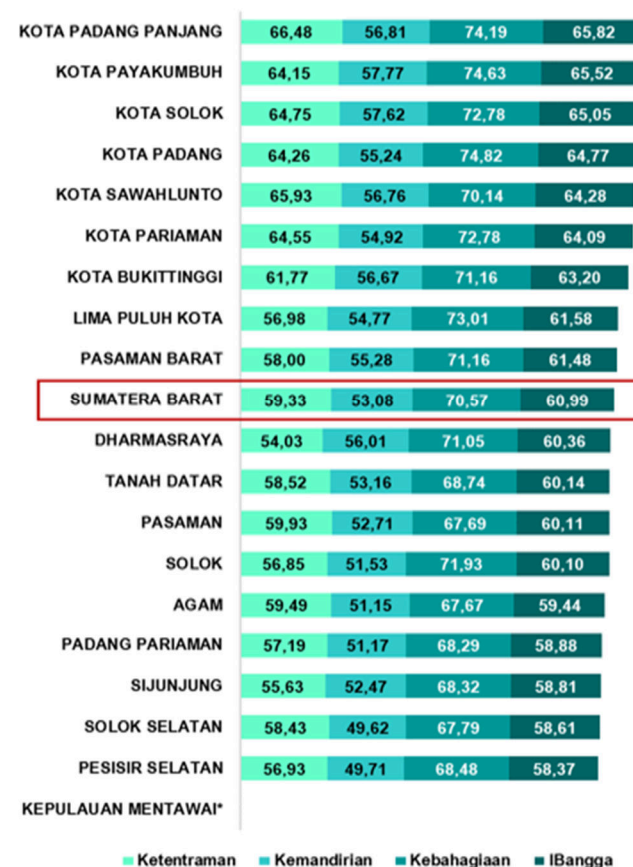
INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021- 2023

Tren iBangga Provinsi Sumatera Barat, 2021-2023



Sumber Capaian : PK-21, Pemutakhiran PK-22, Pemutakhiran PK-23
Sumber Target : Perjanjian Kinerja

iBangga 2023: Kabupaten/Kota Prov Sumatera Barat



Sumber : Pemutakhiran PK-23; , *Kabupaten/kota dengan RSE >= 25% jadi perlu kehati-hatian dalam penggunaan angka capaian indikator

TABEL INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

KABUPATEN/KOTA	INDEKS			iBANGGA	RANK PROVINSI	RANK NASIONAL
	KETENTRAMAN (X1)	KEMANDIRIAN (X2)	KEBAHAGIAAN (X3)			
AGAM	54,80	52,69	55,05	54,18	15	363
DHARMASRAYA	53,41	54,46	57,51	55,13	11	300
KEPULAUAN MENTAWAI	54,47	45,07	54,95	51,50	19	459
KOTA BUKITTINGGI	60,03	56,30	59,95	58,76	2	41
KOTA PADANG	55,23	54,10	60,03	56,45	7	196
KOTA PADANG PANJANG	63,91	55,16	60,66	59,91	1	12
KOTA PARIAMAN	58,89	53,89	62,18	58,32	3	67
KOTA PAYAKUMBUH	55,85	56,33	60,93	57,71	6	106
KOTA SAWAHLUNTO	58,40	55,82	59,08	57,77	5	100
KOTA SOLOK	56,33	56,11	61,06	57,84	4	92
LIMA PULUH KOTA	53,24	53,66	58,36	55,08	13	304
PADANG PARIAMAN	53,82	50,55	52,42	52,26	18	443
PASAMAN	54,58	52,34	56,11	54,34	14	352
PASAMAN BARAT	54,62	53,74	57,92	55,42	9	282
PESISIR SELATAN	54,15	52,08	59,76	55,33	10	293
SIJUNJUNG	52,13	52,91	56,81	53,95	16	372
SOLOK	54,76	52,17	58,37	55,10	12	303
SOLOK SELATAN	54,42	52,39	53,72	53,51	17	397
TANAH DATAR	54,57	54,02	57,99	55,53	8	270

TABEL INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI TAHUN 2022

PROVINSI	INDEKS			iBANGGA
	KETENTRAMAN (X1)	KEMANDIRIAN (X2)	KEBAHAGIAAN (X3)	
ACEH	60,99	51,78	60,61	57,79
BALI	62,44	53,25	61,22	58,97
BANTEN	57,89	53,06	59,98	56,98
BENGKULU	59,30	52,81	60,41	57,51
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	62,84	54,52	60,89	59,42
GORONTALO	58,75	51,67	53,74	54,72
JAMBI	57,61	52,66	59,74	56,67
JAWA BARAT	59,21	54,01	60,40	57,87
JAWA TENGAH	60,54	54,31	59,62	58,16
JAWA TIMUR	59,93	53,89	59,79	57,87
KALIMANTAN BARAT	57,48	49,84	56,50	54,61
KALIMANTAN SELATAN	57,89	52,25	57,31	55,82
KALIMANTAN TENGAH	56,73	50,44	55,58	54,25
KALIMANTAN TIMUR	61,74	50,88	57,55	56,72
KALIMANTAN UTARA	62,63	49,89	55,89	56,14
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	59,79	52,30	58,62	56,90
KEPULAUAN RIAU	61,88	53,49	62,79	59,39
LAMPUNG	56,67	52,61	58,03	55,77
MALUKU	56,37	51,70	59,94	56,00
MALUKU UTARA	56,33	51,40	58,82	55,52
NUSA TENGGARA BARAT	54,31	51,93	56,07	54,10
NUSA TENGGARA TIMUR	55,92	49,02	55,58	53,51
PAPUA	52,27	40,50	46,18	46,32
PAPUA BARAT	55,32	43,29	55,75	51,45
RIAU	57,32	52,38	60,52	56,74
SULAWESI BARAT	60,68	50,05	54,73	55,15
SULAWESI SELATAN	60,84	52,07	53,88	55,60
SULAWESI TENGAH	58,47	49,63	55,15	54,42
SULAWESI TENGGARA	58,44	51,73	55,47	55,21
SULAWESI UTARA	61,79	52,65	56,49	56,98
SUMATERA BARAT	58,63	53,18	56,56	56,12
SUMATERA SELATAN	57,02	53,63	58,22	56,29
SUMATERA UTARA	56,25	53,12	55,56	54,98
INDONESIA	58,23	52,41	57,56	56,07
Tahun 2021	55,99	52,09	53,96	54,01

TABEL 1

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KETENTRAMAN
PENDATAAN KELUARGA INDONESIA

PERIODE: 2021

WILAYAH: Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KETENTRAMAN																								
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA (USIA 10 TAHUN KE ATAS) MENJALANKAN IBADAH SECARA RUTIN SESUAI DENGAN TUNTUNAN AGAMA/ATAU KEPERCAYAAN YANG DIANUT			KELUARGA MEMILIKI BUKU/AKTANIKAH YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANAK (USIA 0-17 TAHUN) DALAM KELUARGA MEMILIKI AKTA LAHIR YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI KARTU JAMINAN KESEHATAN (PEMERINTAH/SWASTA)		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT KONFLIK DI ANTARA ANGGOTA KELUARGA												KELUARGA MENGALAMI CERAI HIDUP	
														TANPA TEGUR SAPA (SELAMA 3 HARI BERTURUT-TURUT)			PISAH RANJANG ANTARA SUMI DAN ISTRI (SELAMAT HARI BERTURUT-TURUT)			PERGI DARI RUMAH/MINGGAT (SELAMA 2 HARI BERTURUT-TURUT)			KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA				
			YA	TIDAK		YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
01	PANCUNG SOAL	5,122	5,017	105	4,236	91	795	3,482	307	1,333	2,153	2,969	50	4,838	234	29	4,270	823	27	4,861	234	12	4,876	234	209	4,913	
02	RANAH PESISIR	8,655	8,534	121	6,611	133	1,911	4,782	455	3,418	4,173	4,482	134	7,515	1,006	56	6,659	1,940	97	7,552	1,006	36	7,613	1,006	448	8,207	
03	LENGAYANG	14,894	14,754	140	11,384	596	2,914	8,390	840	5,664	7,074	7,820	85	13,910	899	51	11,850	2,993	90	13,905	899	29	13,966	899	793	14,101	
04	BATANG KAPAS	7,433	7,256	177	5,812	402	1,219	4,775	149	2,509	3,301	4,132	88	6,944	401	57	6,097	1,279	71	6,961	401	38	6,994	401	325	7,108	
05	IV JURAI	10,450	9,113	1,337	8,321	378	1,751	6,441	158	3,851	6,815	3,635	269	9,645	536	76	8,575	1,799	81	9,833	536	33	9,881	536	418	10,032	
06	BAYANG	10,122	9,824	298	6,655	758	2,709	5,407	186	4,529	5,379	4,743	138	8,799	1,185	50	7,310	2,762	67	8,870	1,185	18	8,919	1,185	557	9,565	
07	KOTO XI TARUSAN	8,252	8,090	162	6,618	410	1,224	5,353	427	2,472	3,175	5,077	81	7,972	199	51	6,916	1,285	76	7,977	199	34	8,019	199	292	7,960	
08	SUTERA	10,571	10,153	418	8,754	720	1,097	7,604	544	2,423	3,496	7,075	133	10,211	227	78	9,382	1,111	97	10,247	227	40	10,304	227	363	10,208	
09	LINGGO SARI BAGANTI	11,909	11,064	845	9,100	834	1,975	7,659	1,104	3,146	4,152	7,757	452	10,872	585	42	9,838	2,029	109	11,215	585	39	11,285	585	665	11,244	
10	LUNANG	5,812	5,593	219	4,702	266	844	3,688	276	1,848	2,652	3,160	73	5,416	323	26	4,894	892	57	5,432	323	14	5,475	323	221	5,591	
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,873	3,812	61	3,138	43	692	2,534	117	1,222	1,679	2,194	71	3,569	233	27	3,145	701	66	3,574	233	24	3,616	233	167	3,706	
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,905	1,855	50	1,447	63	395	1,082	18	805	1,185	720	23	1,746	136	9	1,482	414	15	1,754	136	4	1,765	136	90	1,815	
13	AIRPURA	4,204	4,113	91	3,456	88	660	2,893	156	1,155	1,972	2,232	82	3,882	240	47	3,484	673	69	3,895	240	39	3,925	240	227	3,977	
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,487	3,096	391	3,091	172	224	2,560	125	802	1,336	2,151	70	3,395	22	16	3,239	232	27	3,438	22	19	3,446	22	83	3,404	
15	SILAUT	3,777	3,676	101	3,381	33	363	2,671	106	1,000	1,088	2,689	17	3,601	159	16	3,397	364	14	3,604	159	11	3,607	159	90	3,687	
JUMLAH TOTAL		110,466	105,950	4,516	86,706	4,987	18,773	69,321	4,968	36,177	49,630	60,836	1,766	102,315	6,385	631	90,538	19,297	963	103,118	6,385	390	103,691	6,385	4,948	105,518	

Sumber: Pendataan Keluarga: Tanggal dan Jam laporan diambil/download

TABEL 2

**JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN
PENDATAAN KELUARGA INDONESIA**

PERIODE: 2021

WILAYAH: Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEMANDIRIAN														
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" (MAKANAN POKOK, SAYUR/BUAH DAN LAUK) PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TINGGAL DALAM RUMAH LAYAK HUNI		KELUARGA MEMILIKI TABUNGAN/SIMPANAN (UANG KONTAN, PERHIASAN, HEWAN TERNAK, HASIL KEBUN, DLL) YANG DAPAT DIGUNAKAN SEWAKTU-WAKTU UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK DALAM 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN		SETIAP ANGGOTA KELUARGA YANG SAAT INI BERUSIA SEKOLAH (7-18 TAHUN) TIDAK ADA YANG PUTUS SEKOLAH DI SD/SEDERAJAT SAMPAI DENGAN SLTA/SEDERAJAT			SELAMA 1 (SATU) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT ANGGOTA KELUARGA YANG SAKIT (EMPAT HARI BERTURUT-TURUT) SEHINGGA MENINGGALKAN AKTIFITAS, ATAU ADA ANGGOTA KELUARGA YANG DISABILITAS		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MENAKSES INFORMASI DARI MEDIA ONLINE (INTERNET)	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	PANCUNG SOAL	5,122	4,114	1,008	5,076	46	4,545	577	3,272	1,850	4,707	415	0	741	4,381	3,502	1,620
02	RANAH PESISIR	8,655	8,276	379	8,403	252	7,768	887	7,169	1,486	8,003	652	0	1,056	7,599	6,792	1,863
03	LENGAYANG	14,894	13,861	1,033	14,559	335	13,832	1,062	9,540	5,354	13,635	1,259	0	1,252	13,642	11,074	3,820
04	BATANG KAPAS	7,433	6,774	659	7,259	174	6,920	513	5,141	2,292	6,689	744	0	994	6,439	5,769	1,664
05	IV JURAI	10,450	9,450	1,000	10,252	198	9,817	633	6,065	4,385	9,671	779	0	1,508	8,942	7,671	2,779
06	BAYANG	10,122	8,798	1,324	9,646	476	8,907	1,215	5,875	4,247	9,366	756	0	1,920	8,202	6,250	3,872
07	KOTO XI TARUSAN	8,252	7,701	551	7,996	256	7,586	666	4,654	3,598	7,383	869	0	1,583	6,669	5,647	2,605
08	SUTERA	10,571	9,722	849	10,276	295	8,637	1,934	6,330	4,241	9,297	1,274	0	1,808	8,763	7,935	2,636
09	LINGGO SARI BAGANTI	11,909	11,367	542	11,541	368	10,268	1,641	8,541	3,368	10,884	1,025	0	1,619	10,290	8,941	2,968
10	LUNANG	5,812	5,524	288	5,732	80	5,054	758	4,338	1,474	5,280	532	0	1,162	4,650	4,410	1,402
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,873	3,677	196	3,712	161	3,422	451	2,211	1,662	3,506	367	0	809	3,064	2,417	1,456
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,905	1,742	163	1,900	5	1,549	356	1,337	568	1,775	130	0	480	1,425	1,647	258
13	AIRPURA	4,204	3,942	262	4,170	34	3,931	273	3,529	675	3,793	411	0	1,216	2,988	3,315	889
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,487	3,285	202	3,136	351	2,726	761	1,753	1,734	3,164	323	0	700	2,787	2,352	1,135
15	SILAUT	3,777	3,757	20	3,775	2	3,498	279	3,389	388	3,415	362	0	315	3,462	3,377	400
JUMLAH TOTAL		110,466	101,990	8,476	107,433	3,033	98,460	12,006	73,144	37,322	100,568	9,898	0	17,163	93,303	81,099	29,367

Sumber: Pendataan Keluarga; Tanggal dan Jam laporan diambil/download

TABEL 3

**JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEBAHAGIAAN
PENDATAAN KELUARGA INDONESIA**

PERIODE: 2021

WILAYAH: Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEBAHAGIAAN										
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI WAKTU UNTUK BERINTERAKSI SETIAP HARI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, PENGASUHAN ANAK DILAKUKAN BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTRI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA PERNAH BEREKREASI BERSAMA DI LUAR RUMAH			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA IKUT SERTA DALAM KEGIATAN SOSIAL/GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN RT	
			YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	PANCUNG SOAL	5,122	4,172	717	233	3,785	34	1,303	4,385	503	234	4,060	1,062
02	RANAH PESISIR	8,655	7,212	438	1,005	5,450	100	3,105	5,959	1,691	1,005	7,336	1,319
03	LENGAYANG	14,894	12,963	1,033	898	9,546	511	4,837	9,027	4,969	898	12,469	2,425
04	BATANG KAPAS	7,433	6,139	893	401	5,068	217	2,148	5,052	1,980	401	5,781	1,652
05	IV JURAI	10,450	9,568	346	536	7,066	218	3,166	7,582	2,332	536	6,018	4,432
06	BAYANG	10,122	8,246	691	1,185	5,788	295	4,039	6,225	2,712	1,185	6,842	3,280
07	KOTO XI TARUSAN	8,252	7,363	689	200	5,974	156	2,122	5,609	2,443	200	5,109	3,143
08	SUTERA	10,571	9,938	406	227	7,785	599	2,187	8,699	1,645	227	8,144	2,427
09	LINGGO SARI BAGANTI	11,909	10,620	704	585	7,998	589	3,322	8,675	2,649	585	8,546	3,363
10	LUNANG	5,812	5,243	246	323	4,046	76	1,690	4,565	924	323	4,753	1,059
11	BASA AMPEK BALAI	3,873	3,385	256	232	2,723	42	1,108	2,586	1,054	233	2,923	950
12	IV NAGARI BAYANG	1,905	1,697	72	136	1,156	57	692	1,328	442	135	1,768	137
13	AIRPURA	4,204	3,646	318	240	3,049	42	1,113	3,470	494	240	3,412	792
14	RANAH AMPEK HULU	3,487	3,023	442	22	2,832	54	601	2,034	1,431	22	2,757	730
15	SILAUT	3,777	3,594	24	159	2,928	14	835	3,272	346	159	3,474	303
JUMLAH TOTAL		110,466	96,809	7,275	6,382	75,194	3,004	32,268	78,468	25,615	6,383	83,392	27,074

Sumber: Pendataan Keluarga; Tanggal dan Jam laporan diambil/download

TABEL 1

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KETENTRAMAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE: s.d 2022

WILAYAH: Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KETENTRAMAN																							KELUARGA MENGALAM CERA HIDUP		
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA (USIA 10 TAHUN KE ATAS) MENJALANKAN IBADAH SECARA RUTIN SESUAI DENGAN TUNTUNAN AGAMA/ATAU KEPERCAYAAN YANG DIANUT		KELUARGA MEMILIKI BUKU/AKTANIKAH YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANAK (USIA 6-17 TAHUN) DALAM KELUARGA MEMILIKI AKTA LAHIR YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI KARTU JAMINAN KESEHATAN (PEMERINTAH/SWASTA)		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT KONFLIK DIANTARA ANGGOTA KELUARGA															
													TANPA TEGUR SAPA (SELAMA 3 HARI BERTURUT-TURUT)			PISAH RANJANG ANTARA SUAMI DAN ISTRI (SELAMA 7 HARI BERTURUT-TURUT)			PERGI DARI RUMAH/MINGGAT (SELAMA 2 HARI BERTURUT-TURUT)			KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA						
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
01	PANCUNG SOAL	5,646	5,621	25	4,537	71	1,038	3,732	353	1,561	2,383	3,263	189	5,055	402	62	4,546	1,038	74	5,170	402	43	5,201	402	273	5,373		
02	RAHAH PESIR	8,651	8,530	121	6,581	128	1,942	4,779	455	3,417	4,173	4,478	134	7,496	1,021	56	6,653	1,942	97	7,533	1,021	36	7,594	1,021	448	8,203		
03	LENGAYANG	15,356	15,269	87	11,406	642	3,308	8,503	942	5,911	7,307	8,049	95	14,018	1,243	56	11,992	3,308	87	14,026	1,243	31	14,082	1,243	879	14,477		
04	BATANG KAPAS	7,803	7,680	123	6,028	334	1,441	4,895	193	2,715	3,404	4,399	77	7,204	522	42	6,320	1,441	61	7,220	522	24	7,257	522	357	7,446		
05	M JURAI	10,936	9,810	1,126	8,595	369	1,972	6,576	161	4,199	7,149	3,787	266	9,891	779	72	8,892	1,972	78	10,079	779	32	10,125	779	470	10,466		
06	BAYANG	10,692	10,412	280	7,119	614	2,959	5,687	199	4,806	5,799	4,893	129	8,940	1,623	54	7,679	2,959	81	8,988	1,623	25	9,044	1,623	610	10,082		
07	KOTO XI TARUSAN	9,298	9,065	233	7,173	463	1,662	5,794	451	3,053	3,635	5,663	84	8,689	525	60	7,576	1,662	81	8,692	525	43	8,730	525	365	8,933		
08	SUTERA	10,694	10,233	461	8,665	798	1,231	7,542	593	2,559	3,632	7,062	123	10,238	333	66	9,397	1,231	93	10,268	333	36	10,325	333	394	10,300		
09	LINGGO SARI BAGANTI	12,387	11,728	659	9,311	679	2,397	7,444	1,271	3,672	4,210	8,177	469	10,996	922	107	9,883	2,397	103	11,362	922	103	11,362	922	745	11,642		
10	LUNANG	5,835	5,704	131	4,686	209	940	3,649	281	1,905	2,641	3,194	68	5,350	417	31	4,864	940	58	5,360	417	30	5,388	417	237	5,598		
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,873	3,812	61	3,129	43	701	2,534	117	1,222	1,679	2,194	70	3,519	284	27	3,145	701	64	3,525	284	23	3,566	284	167	3,706		
12	M NAGARI BAYANG UTARA	1,905	1,855	50	1,429	62	414	1,082	18	805	1,185	720	22	1,703	180	9	1,482	414	15	1,710	180	4	1,721	180	90	1,815		
13	ARRURA	4,204	4,113	91	3,443	88	673	2,893	156	1,155	1,972	2,232	82	3,868	254	47	3,484	673	69	3,881	254	39	3,911	254	227	3,977		
14	RAHAH AMPEK HULU TAPAN	3,483	3,092	391	3,081	170	232	2,556	125	802	1,336	2,147	70	3,384	29	16	3,235	232	26	3,428	29	18	3,436	29	83	3,400		
15	SILAUT	3,777	3,676	101	3,380	33	364	2,671	106	1,000	1,088	2,689	17	3,586	174	16	3,397	364	14	3,589	174	11	3,592	174	90	3,687		
JUMLAH TOTAL		114,540	110,600	3,940	88,563	4,703	21,274	70,337	5,421	38,782	51,593	62,947	1,895	103,937	8,708	721	92,545	21,274	1,001	104,831	8,708	498	105,334	8,708	5,435	109,105		

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

WILAYAH: Kabupaten

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

TABEL 3

**JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEBAHAGIAAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

PERIODE: s.d 2022

WILAYAH: Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEBAHAGIAAN										
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI WAKTU UNTUK BERINTERAKSI SETIAP HARI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, PENGASUHAN ANAK DILAKUKAN BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTRI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA PERNAH BEREKREASI BERSAMA DI LUAR RUMAH			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA IKUT SERTA DALAM KEGIATAN SOSIAL/GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN RT	
			YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	PANCUNG SOAL	5,646	4,916	328	402	4,072	66	1,508	4,883	361	402	5,184	462
02	RANAH PESISIR	8,651	7,198	432	1,021	5,448	99	3,104	5,950	1,680	1,021	7,332	1,319
03	LENGAYANG	15,356	12,976	1,137	1,243	9,962	455	4,939	10,815	3,298	1,243	13,187	2,169
04	BATANG KAPAS	7,803	6,409	872	522	5,299	254	2,250	5,674	1,607	522	6,264	1,539
05	IV JURAI	10,936	9,836	321	779	7,323	222	3,391	8,066	2,091	779	7,070	3,866
06	BAYANG	10,692	8,032	1,037	1,623	6,070	386	4,236	6,036	3,033	1,623	7,405	3,287
07	KOTO XI TARUSAN	9,298	7,861	912	525	6,471	245	2,582	5,941	2,832	525	6,104	3,194
08	SUTERA	10,694	9,955	406	333	7,909	521	2,264	8,481	1,880	333	8,349	2,345
09	LINGGO SARI BAGANTI	12,387	10,418	1,047	922	8,312	473	3,602	9,194	2,271	922	9,087	3,300
10	LUNANG	5,835	5,179	239	417	4,063	85	1,687	4,402	1,016	417	4,899	936
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,873	3,347	242	284	2,723	42	1,108	2,567	1,022	284	2,923	950
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,905	1,658	67	180	1,156	57	692	1,291	434	180	1,768	137
13	AIRPURA	4,204	3,642	308	254	3,049	42	1,113	3,466	484	254	3,412	792
14	RANAH AMPEK HULU	3,483	3,012	442	29	2,828	54	601	2,029	1,425	29	2,753	730
15	SILAUT	3,777	3,580	23	174	2,928	14	835	3,271	332	174	3,474	303
JUMLAH TOTAL		114,540	98,019	7,813	8,708	77,613	3,015	33,912	82,066	23,766	8,708	89,211	25,329

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

TABEL 1

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KETENTRAMAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE: s.d 2023

WILAYAH: Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KETENTRAMAN																								KELUARGA MENGALAM CERA HIDUP	
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT KONFLIK DIANTARA ANGGOTA KELUARGA																									
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA (USIA 10 TAHUN KE ATAS) MENJALANKAN IBADAH SECARA RUTIN SESUAI DENGAN TUNTUNAN AGAMA/ATAU KEPERCAYAAN YANG DIAMUT		KELUARGA MEMILIKI BUKU/KITANINIAH YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANAK (USIA 5-17 TAHUN) DALAM KELUARGA MEMILIKI AKTA LAHIR YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI KARTU JAMINAN KESEHATAN (PEMERINTAH/SWASTA)		TANPA TEGUR SAPA (SELAMA 3 HARI BERTURUT-TURUT)			PISAH RANJANG ANTARA SUAMI DAN ISTRI (SELAMA 7 HARI BERTURUT-TURUT)			PERGI DARI RUMAH/MINGGAT (SELAMA 2 HARI BERTURUT-TURUT)			KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA						
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
01	PANJUNG SOAL	5,646	5,621	25	4,537	71	1,038	3,651	347	1,648	2,383	3,263	189	5,055	402	62	4,546	1,038	74	5,170	402	43	5,201	402	273	5,373		
02	RAHAH PESIR	8,651	8,530	121	6,581	128	1,942	4,391	417	3,843	4,173	4,478	134	7,496	1,021	56	6,653	1,942	97	7,533	1,021	36	7,594	1,021	448	8,203		
03	LENGAYANG	16,189	16,085	104	11,999	537	3,653	8,603	955	6,631	7,744	8,445	110	14,618	1,461	68	12,468	3,653	94	14,634	1,461	40	14,688	1,461	950	15,239		
04	BATANG KAPAS	7,803	7,680	123	6,028	334	1,441	4,662	179	2,962	3,404	4,399	77	7,204	522	42	6,320	1,441	61	7,220	522	24	7,257	522	357	7,446		
05	IV JURAI	12,822	11,702	1,120	9,886	368	2,568	7,214	180	5,428	8,441	4,381	185	11,555	1,082	126	10,128	2,568	143	11,597	1,082	85	11,655	1,082	625	12,197		
06	BAYANG	10,682	10,412	280	7,119	614	2,959	5,300	180	5,212	5,799	4,893	129	8,940	1,623	54	7,679	2,959	81	8,988	1,623	25	9,044	1,623	610	10,082		
07	KOTO XI TARUSAN	10,097	9,903	194	7,648	509	1,940	5,872	422	3,803	4,010	6,087	135	9,316	646	60	8,097	1,940	86	9,365	646	39	9,412	646	446	9,851		
08	SUTERA	10,694	10,233	461	8,665	798	1,231	7,185	567	2,942	3,632	7,062	123	10,238	333	66	9,397	1,231	93	10,268	333	36	10,325	333	394	10,300		
09	LINGGO SARI BAGANTI	12,994	12,174	820	9,530	810	2,654	7,443	1,337	4,214	4,356	8,638	503	11,388	1,103	125	10,215	2,654	118	11,773	1,103	118	11,773	1,103	810	12,184		
10	LUNANG	5,835	5,704	131	4,686	209	940	3,454	269	2,112	2,641	3,194	68	5,350	417	31	4,864	940	58	5,360	417	30	5,388	417	237	5,598		
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,873	3,812	61	3,129	43	701	2,368	110	1,395	1,679	2,194	70	3,519	284	27	3,145	701	64	3,525	284	23	3,566	284	167	3,706		
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,905	1,855	50	1,429	62	414	989	13	903	1,185	720	22	1,703	180	9	1,482	414	15	1,710	180	4	1,721	180	90	1,815		
13	AIRPURA	4,204	4,113	91	3,443	88	673	2,716	137	1,351	1,972	2,232	82	3,868	254	47	3,484	673	69	3,881	254	39	3,911	254	227	3,977		
14	RAHAH AMPEK HULU TAPAN	3,483	3,092	391	3,081	170	232	2,401	112	970	1,336	2,147	70	3,384	29	16	3,235	232	26	3,428	29	18	3,436	29	83	3,400		
15	SILAUT	4,087	4,001	86	3,587	32	468	2,688	131	1,268	1,156	2,931	95	3,750	242	28	3,591	468	23	3,822	242	19	3,826	242	122	3,965		
JUMLAH TOTAL		118,975	114,917	4,058	91,348	4,773	22,854	68,937	5,356	44,682	53,911	65,064	1,992	107,384	9,599	817	95,304	22,854	1,102	108,274	9,599	579	108,797	9,599	5,839	113,136		

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

WILAYAH: Kabupaten

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

TABEL 3

**JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEBAHAGIAAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

PERIODE: s.d 2023

WILAYAH: Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEBAHAGIAAN										
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI WAKTU UNTUK BERINTERAKSI SETIAP HARI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, PENGASUHAN ANAK DILAKUKAN BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTRI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA PERNAH BEREKREASI BERSAMA DI LUAR RUMAH			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA IKUT SERTA DALAM KEGIATAN SOSIAL/GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN RT	
			YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	PANCUNG SOAL	5,646	4,916	328	402	4,072	66	1,508	4,883	361	402	5,184	462
02	RANAH PESISIR	8,651	7,198	432	1,021	5,448	99	3,104	5,950	1,680	1,021	7,332	1,319
03	LENGAYANG	16,189	13,478	1,250	1,461	10,067	530	5,592	11,556	3,172	1,461	13,774	2,415
04	BATANG KAPAS	7,803	6,409	872	522	5,299	254	2,250	5,674	1,607	522	6,264	1,539
05	IV JURAI	12,822	11,089	651	1,082	8,186	384	4,252	9,353	2,387	1,082	9,347	3,475
06	BAYANG	10,692	8,032	1,037	1,623	6,070	386	4,236	6,036	3,033	1,623	7,405	3,287
07	KOTO XI TARUSAN	10,097	8,500	951	646	6,864	252	2,981	6,521	2,930	646	7,048	3,049
08	SUTERA	10,694	9,955	406	333	7,909	521	2,264	8,481	1,880	333	8,349	2,345
09	LINGGO SARI BAGANTI	12,994	10,679	1,212	1,103	8,551	454	3,989	9,338	2,553	1,103	9,277	3,717
10	LUNANG	5,835	5,179	239	417	4,063	85	1,687	4,402	1,016	417	4,899	936
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,873	3,347	242	284	2,723	42	1,108	2,567	1,022	284	2,923	950
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,905	1,658	67	180	1,156	57	692	1,291	434	180	1,768	137
13	AIRPURA	4,204	3,642	308	254	3,049	42	1,113	3,466	484	254	3,412	792
14	RANAH AMPEK HULU	3,483	3,012	442	29	2,828	54	601	2,029	1,425	29	2,753	730
15	SILAUT	4,087	3,820	25	242	3,098	12	977	3,550	295	242	3,755	332
JUMLAH TOTAL		118,975	100,914	8,462	9,599	79,383	3,238	36,354	85,097	24,279	9,599	93,490	25,485

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Tahun Terakhir (2021 s.d 2023)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
9.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Persen	54,00%	55,33%	58,37%	99,47%	101,92%	107,52%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi

: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 adalah 58,37% dengan Standar Nasional/Provinsi adalah 60,99%.

5. Analisis Faktor :

a. Faktor Keberhasilan/Peningkatan :

1. Mengoptimalkan pertemuan rapat koordinasi bulanan di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dengan PKB/PLKB Kecamatan, agar adanya minat akseptor MOP dalam Peningkatan Kesertaan KB Pria yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
2. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan serta membuat proposal untuk mencari sponsor dan donatur pelaksanaan kegiatan Pemilihan Duta Genre;
3. Pembagian wilayah kerja sasaran berdasarkan domisili Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilakukan ke 182 Nagari, dalam 1 Nagari rata-rata hanya terdapat 1-2 Orang sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk itu perlu diajukan penambahan anggaran dan tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kasi Pelayanan RSUD M. Zein Painan terkait penanganan komplikasi Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan KB MKJP oleh DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

b. Faktor Kegagalan/Penurunan :

1. Tidak adanya minat akseptor MOP dalam Peningkatan Kesertaan KB Pria yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Duta Genre;
3. Keterbatasan anggaran untuk Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi dari Kabupaten sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah dibentuk dari Nagari dan Kecamatan, sedangkan lokasi sasaran yang akan dilakukan pendampingan memerlukan biaya transportasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;
4. Tidak tersedianya anggaran penanganan komplikasi Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan KB MKJP oleh DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan, karena anggarannya sudah disediakan pada Dinas Kesehatan.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

: Dengan mengoptimalkan SDM yang ada, terdiri dari : PKB/PLKB Kecamatan pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana di 15 Kecamatan dan Staf pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator ini ditunjang oleh Program Pengendalian Penduduk dengan Target Anggaran Rp. 263.400.000 dan Realisasi sebesar Rp. 225.330.499 atau capaian 85,55%, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan Target Anggaran Rp. 3.483.316.024 dan Realisasi sebesar Rp. 3.119.893.230 atau capaian 89,57%, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan Target Anggaran Rp. 2.388.600.000 dan Realisasi sebesar Rp. 2.126.290.000 atau capaian 89,02%, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp. 663.802.295 atau 10,82%.